

## Siti Ruhaini Dzuhayatin

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

# MENEMUKAN TUHAN DI MONASH

POLA RELASI GENDER DALAM REZIM SOSIAL DIDALAMI SITI RUHAINI DZUHAYATIN, BAIK DI INSTITUSI AKADEMIK MAUPUN ORGANISASI SOSIAL MUHAMMADIYAH. SEMPAT MEMBUAT GEMPAR BEBERAPA KALI DENGAN TEORI-TEORI TENTANG RELASI GENDER. DIA MENEMUKAN TUHAN DI AUSTRALIA.



**M**asalah relasi gender telah menjadi perhatian Siti Ruhaini Dzuhayatin sedari kecil di pesantren. Menurutnya, sejak dulu, Islam sudah menyosialisasikan bahwa Allah tidak memiliki jenis kelamin. “Itu yang selalu disosialisasikan tentang konsep Tuhan, meski beragam konotasi tentang Tuhan masih beraroma maskulin,” katanya. Ketika masuk pesantren, Ruhaini belajar bahasa Arab, bahasa yang memiliki kaidah *muannas* atau feminim dan *muzakkar* atau maskulin. Di dalam Al-Qur’an, misbah atau predikat untuk menjelaskan Allah kebanyakan bersifat *muzakkar*. “Padahal, sejak kecil sudah diajarkan bahwa Allah tidak memiliki kecenderungan gender,” katanya.

Pada usia 15 tahun, dia mulai memikirkan bagaimana cara memahami bahwa Tuhan bukan laki-laki seperti apa yang banyak disebutkan dalam

RANDY/KSP

“Kalau dulu Tuhan yang disembah masyarakat Arab adalah muannas, maka Tuhan yang dibawa Islam itu harus berposisi. Karena ini revolusi keyakinan.”

**SITI RUHAINI DZUHAYATIN**

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI

Al-Qur’an. Ruhaini akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Bahasa Arab tidak bisa memuaskan rasa ingin tahunya tentang Tuhan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari jawabannya di luar pesantren. “Mungkin di IAIN saya bisa mendapatkan jawabannya,” katanya.

Ketika di IAIN, dia juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Begitu juga ketika mendiskusikan hal tersebut dengan kawan-kawan organisasinya dulu. Tentu saja, Ruhaini tetap percaya kepada Allah dan berislam secara benar meski merasa ada yang kurang. “Ya sudah, kita tetap percaya saja sama Tuhan,” kata dia.

Lalu saat dia melanjutkan studi magister di Monash University, Australia, ada salah satu dosen yang membahas soal gender, maka pertanyaan itu pun kembali lagi. Dia ingat mata kuliah itu adalah *cultural inequality* atau ketidaksetaraan budaya. Di situ disebutkan bahwa ketidaksetaraan budaya bisa disebabkan banyak hal, salah satunya bahasa.

Saat itu yang digunakan sebagai contoh adalah bahasa Inggris dan Prancis. Ada asosiasi-asosiasi yang terkait dengan kekuasaan itu bersifat maskulin. “Dari situ mulai muncul lagi keresahan saya. Bagaimana kira-kira dengan bahasa Arab?” katanya.

Menurut Ruhaini, bahasa Arab itu cukup dekat dengan bahasa Prancis karena mereka sama-sama Mediterania, yang ternyata tata bahasanya agak mirip. Artinya, bahasa Arab merupakan bahasa bergender. “Kalau begitu, ini pengaruh dari struktur bahasa. Kenapa Tuhan diberikan *muzakkar* dan *muannas*? Ya, karena struktur bahasa,” katanya.

Tapi tetap hal ini belum memuaskan Ruhaini. Masih ada pertanyaan substansial, seperti pemilihan sifat *muannas* atau *muzakkar*. “Karena itu arbitrer. Itu bisa *muannas*, bisa *muzakkar*. Dalam bahasa Arab ada juga yang terkadang tidak paralel dengan struktur bahasa,” katanya.

Misalnya soal *syamsiyah* yang berarti matahari dalam bahasa Arab dikategorikan menjadi feminim. Namun *qamariyah* yang berarti rembulan justru diartikan maskulin. Ini berbeda dengan struktur bahasa yang lain.

Setelah mempelajari secara mendalam, Ruhaini baru menemukan jawaban bahwa bahasa Mediterania yang memiliki sifat gender itu memiliki konteks. Artinya, bahasa tidak berposisi biner. “Bukan berarti jika Tuhan disebut *muannas* menjadi tidak baik bagi *muzakkar*,” katanya.

Dalam pencariannya, dia menemukan alasan kenapa Tuhan dalam Islam sering disebut sebagai *muzakkar*. Hal itu karena tiga berhala yang disembah dalam era pra-Islam di Arab bersifat *muannas*. Latta, Uzza, dan Manat itu misbahnya adalah feminim.

Ketika Islam membawa revolusi ketuhanan, maka perlu berposisi dengan Tuhan yang pernah ada. “Kalau dulu Tuhan yang disembah masyarakat Arab adalah *muannas*, maka Tuhan yang dibawa Islam itu harus berposisi. Karena ini revolusi keyakinan,” katanya.

Sehingga pada saat itu, Ruhaini sempat berseloroh bahwa kali ini dia akan kembali masuk Islam. “Saya mau masuk Islam lagi nih! Kemarin saya Islam karena keturunan, sekarang saya mau masuk Islam karena pencarian,” katanya.

Jadi, Ruhaini memandang studi gender bukan sekadar ketimpangan dan ketidakadilan, melainkan lebih dari itu. Studi gender yang dibawa Ruhaini adalah pengembaraan intelektual untuk

mencari Tuhan. “Setelah itu saya percaya betul bahwa Tuhan tidak laki-laki atau perempuan,” katanya.

\*\*\*

Sepulangnya dari Australia, dia kemudian mengembangkan studi gender sebagai pisau analisis yang begitu kuat dan tajam. “Bagaimana tidak? Pisau analisis ini bisa membuat saya masuk Islam lagi,” candanya. Pisau analisis ini juga bisa membedah budaya dan tradisi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang berbeda.

Untuk melihat gejala ini lebih dalam, Ruhaini mencoba membuat penelitian di kampusnya, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Secara kontekstual, dia melihat ada kecenderungan kepangkatan dosen perempuan lebih rendah ketimbang dosen laki-laki. Maka, Ruhaini mengambil hipotesis bahwa ada faktor tertentu yang bisa menyebabkan hal ini. Karena, lanjutnya, untuk menjadi dosen, tidak ada perbedaan syarat antara laki-laki dan perempuan.

Ruhaini melihat, ada pola relasi budaya yang tidak seimbang. Relasi ini terefleksi juga dari cara para dosen ini memenuhi syarat kenaikan pangkat. Kesimpulan Ruhaini, peraturan yang sifatnya netral bisa berdampak berbeda dari sisi gender karena perbedaan muat-



Siti Ruhaini Dzuhayatin saat promosi doktor di UGM

DOK. PRIBADI



Siti Ruhaini Dzuhayatin saat menghadiri acara Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) 2015

an tradisi. “Mengapa dosen perempuan rendah kepegangannya? Karena tugas kultural dosen perempuan lebih banyak ketimbang dosen laki-laki. Ini tidak diperhitungkan dalam kenaikan pangkat,” katanya.

Misalnya, dalam pedoman untuk kenaikan pangkat, ada satu variabel, yakni pengabdian pada masyarakat. Dalam hal ini adalah khotbah Jumat. “Loh, kan perempuan tidak bisa khotbah Jumat?” ujarnya.

Untuk memperjelas tugas kultural antara perempuan dan laki-laki jauh berbeda, Ruhaini meminta responden yang terdiri dari dosen lintas gender untuk menuliskan kegiatannya dari pagi sampai malam. Hasilnya, dosen laki-laki menuliskan kira-kira 17 aktivitas, sementara dosen perempuan menuliskan 29 aktivitas.

“Yang menarik, dari 17 kegiatan itu, dosen laki-laki masih bisa menuliskan istirahat, menonton televisi, mempersiapkan kuliah, dan pekerjaan yang terkait akademik,” katanya.

Setelah Ruhaini telusuri, tidak

ada satu pun dosen perempuan yang bisa menuliskan variabel istirahat dan menonton televisi dalam kuesionernya. Terlebih lagi, dosen perempuan baru bisa menyiapkan bahan kuliah dan pekerjaan akademiknya setelah pekerjaan rumah tangga selesai. “Itu setelah jam delapan malam, setelah anaknya tidur dan urusan rumah tangganya selesai. Itu jelas hasilnya akan berbeda,” katanya.

Dengan hasil penelitian ini, Ruhaini menilai rendahnya kepegangannya dosen perempuan di IAIN bukan berasal dari lemahnya kemampuan perempuan dalam bidang akademik, melainkan lebih karena tugas kultural yang lebih banyak. “Maka saya mengajukan dua rekomendasi. Pertama, mengapresiasi tugas-tugas kultural yang seharusnya bisa dikonversi. Kedua, IAIN membuat sosialisasi kepada keluarga dosen-dosen IAIN bahwa perlu ada perubahan pola relasi dalam keluarga,” katanya.

Ruhaini juga sempat melakukan riset terkait pekerjaan rumah tangga. Ia

ingin menelusuri bagaimana Islam melihat peran ibu rumah tangga. Dalam beberapa kitab, dia tidak menemukan fakta bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban perempuan. Justru dia menemukan fakta itu di sebuah kitab kecil yang berjudul *Uqudul Lujain fi Bayani Haqiqiz Zaujainy* yang ditulis Imam Nawawi al-Bantani.

Di situ tertulis riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah mendatangi oleh seseorang yang sering dimarahi oleh istrinya di rumah. Namun sesampainya di kediaman sang khalifah, tak disangka istri Umar juga sedang memarahinya. Si pengadu ini tak menyangka, pemimpin umat Islam bisa juga dimarahi oleh sang istri.

Dalam kitab itu, Umar pun menjawab bahwa istrinya yang menjaga anak, membereskan rumah, dan menyediakan makanan, meski sebenarnya itu merupakan tugas suami. “Jadi pekerjaan rumah tangga sebenarnya adalah tugas suami,” katanya.

Dengan argumentasi ini, pada tahun 1995, Ruhaini berhasil membuat

## Dengan hasil penelitian ini, Ruhaini menilai rendahnya kepegangannya dosen perempuan di IAIN bukan berasal dari lemahnya kemampuan perempuan dalam bidang akademik, namun lebih karena tugas kultural yang lebih banyak.

buku dengan judul *Gender Gap in The IAIN Academic Achievement and Structural Position (The case of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Tak ayal, buku ini pun membuat geger dan akhirnya dia dituduh sebagai feminis radikal. Walhasil, buku *Uqudul Lujain* itu akhirnya dia bawa ke mana-mana untuk menjelaskan perihal tersebut. Setelah itu, Ruhaini tetap concern terhadap persoalan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya merupakan kewajiban suami.

Dalam fikih, dia temukan bahwa makanan, pakaian, dan rumah disebut *kiswah*. *Kiswah* artinya menutup kebutuhan keluarga. Di dalam surat *al-Baqarah* ayat 233 menyebutkan bahwa *kiswah* merupakan kewajiban ayah. “Hal yang tidak terkait dengan peran reproduksi seperti mengandung, melahirkan, hingga menyusui itu dibebankan kepada ayah,” katanya.

Hal ini beda lagi ketika Ruhaini membedah secara tajam pola relasi gender di Muhammadiyah. Saat mengambil studi doktoral di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ruhaini menulis disertasi dengan judul “Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi”.

Dalam benaknya, keteraturan pola sosial itu selalu menarik, termasuk keteraturan soal gender. “Siapa sih sebenarnya yang mengatur kita itu menjadi laki-laki atau perempuan? Itu kan semuanya sifatnya regimented atau terstruktur,” katanya. Pada saat itu, istilah rezim hanya digunakan di bidang politik.

Rezim negara, waktu itu Orde Baru, memang memasukkan wanita dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Pancadharmawanita. “Tapi rezim Orde Baru itu baru 30 tahun, tapi yang kita lakukan sebagai laki-laki dan perempuan sudah berabad-abad. Itu semua siapa yang atur?” katanya.

Karena Ruhaini sedang mempelajari sosiologi, maka dia akhirnya men-

dalam soal rezim yang di dalamnya juga terdapat rezim politik, rezim hukum, rezim kesehatan. Di dalam disertasinya, dia merumuskan atau menteoritisasi rezim sosial.

Untuk meneoritisasikan rezim sosial, maka dia perlu objek hukum. Karena Ruhaini mendalami isu gender, maka dia mengambil gender sebagai substansi dari proses teoritisasi rezim sosial. “Karena ada teksnya, ada ideologi dan sumbernya, ada agensinya, ada institusinya, dan ada praktiknya,” katanya.

Maka, Ruhaini mengambil Muhammadiyah sebagai objek institusi sosial. Dia pun meneliti ideologi Muhammadiyah terkait gender, sumber ideologi, relasi, dan posisi gender terinstitusionalisasi di Muhammadiyah. “Misalnya ada Aisyiyah dan Naswiatul Aisyiyah. Maka saya izin ke pak Sekreta-

ris, pak Haedar Nashir saat itu, yang saat itu juga seniornya di Sosiologi UGM,” katanya.

Dulu, Aisyiyah dan Muhammadiyah adalah dua organisasi terpisah, lantas disatukan dan akhirnya posisi Aisyiyah menjadi subordinat Muhammadiyah sebagai organisasi otonom (ortom).

“Nah, buku tentang Rezim Gender di Muhammadiyah bukan Ruhaini yang bicara, tapi fakta di dalam Muhammadiyah itu sendiri dengan interpretasi saya. Jadi, relasi gender di Muhammadiyah adalah relasi yang sifatnya kemitraan junior-senior. Jadi belum menjadi kesetaraan dalam teori feminis. Itu pun bukan berarti jelek, tapi itu hanya pilihan ideologis Muhammadiyah,” ia menjelaskan. ■

ADITYA KIRANA



### SITI RUHAINI DZUHAYATIN

**Pendidikan:** S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta (1988); S2 Sosiologi Monash University, Melbourne Australia (1993); S3 Sosiologi UGM Daerah Istimewa Yogyakarta (2011) | **Jabatan Saat Ini:** Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Masa Tugas 2020-2024; Staf Khusus Presiden RI Bidang Keagamaan In-

ternasional Masa Tugas 2018 - 2019; Direktur Kalijaga Institute for Justice (KIJ), UIN Sunan Kalijaga; Lektor Kepala/ Dosen Senior di UIN Sunan Kalijaga | **Keanggotaan Sosial:** Board, Asian Muslim Action Network (AMAN), Jakarta (2017-2020); Anggota Divisi pada Peningkatan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015); Dewan Direksi dan Pendiri, Komunitas Demokrasi Indonesia, Jakarta (2004-2018); Dewan Direksi, Pusat Studi Perempuan Rifka Annisa (1995-2018); Kepala, Divisi Wanita dan Keluarga, Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (2000-2005); Konsultan pada Hak Asasi Perempuan, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (UII) (1999-2004); Anggota Coalition Against Trafficking in Women (CATW) South East Asia Region, Manila (1995-2005)

| **Publikasi:** Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi, Penerbit Pustaka Pelajar, 2015; Heating the Glass Ceiling in Islamic Education, International Journal of Studia-Islamika, December 2010; Gender Gap in The IAIN Academic Achievement and Structural Position (The case of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999); Islam and Human Right in Indonesia: Teaching human Rights in Islamic University, 2005; Gender and Plurality in Indonesia, The Politics of Multiculturalism, Ed. Robert Hefner (University of Hawaii Press, 2001); Role Expectations of Women in Indonesia, Indonesian Women: Access, Opportunity and Control, Ed. Atho Mudzhar, et.all. (Sunan Kalijaga Press, 2002)

RANDY/KSP